

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 "Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi yang aktif dan produktif, yang dikelola oleh suatu badan usaha dan bukan dari cabang perusahaan yang dikendalikan ataupun jadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar".¹ UMKM ini sudah terbukti menjadi faktor utama dimana mereka memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.² Selain itu, UMKM menawarkan peluang untuk ekspansi pendapatan bisnis dan memberikan banyak prospek pekerjaan. Mereka juga telah terbukti menjadi perlindungan vital selama masa krisis ekonomi di Indonesia serta pembuatan Peredaran Domestik Bruto (PDB), UMKM juga menciptakan lapangan kerja dan menjadi penahan disaat terjadinya guncangan krisisnya ekonomi di Indonesia.³

Jumlah UMKM di Indonesia saat ini sebesar 64,19 juta, dimana komposisi UMKM sangat berdominan yaitu 64,13 juta, atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sector usaha.⁴ Bersama dengan koperasi UMKM mampu memberikan sumbangan positif sebesar 5% terhadap PDB. Maka dari itu tidak salah jika UMKM dinyatakan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.⁵ Jika dilihat seberapa pentingnya peran dari UMKM tersebut, maka sangat dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak guna mengembangkan serta mewujudkan UMKM agar lebih mengembangkan, memberdayakan,

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1 (2008).

²Dewi Rejeki, "Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 7, no. 3 (2020): 35–45, <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i3.446>.

³Rejeki.

⁴Dewi Astriani, Meliana Puspitasari, and Arimurti Trias, "Kesiapan Umkm dalam Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi," 2022, 1357–67.

⁵ Mortigor Afrizal Purba, "Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam," *Jurnal Akuntansi Barelang* 3, no. 2 (2019): 55–63, <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>.

dan memodernisasi UMKM dengan memberi mereka peningkatan akses ke pendanaan dari sektor perbankan.⁶

Namun, pentingnya UMKM tidak selalu diimbangi oleh kualitas laporan keuangan mereka. Untuk mengembangkan usahanya, UMKM selalu terkendala di masalah keuangan atau modal.⁷ Dengan ini pihak pemerintah Indonesia serta Lembaga keuangan memfasilitasi tambahan modal bagi UMKM melalui aplikasi kredit yang disederhanakan. Prasyarat bagi UMKM untuk mengajukan kredit adalah penyerahan laporan keuangan. Laporan ini berfungsi sebagai alat analitis untuk mengevaluasi kemampuan UMKM dalam membayar pinjaman dan meminimalkan risiko gagal bayar.⁸ Dari sekian banyaknya UMKM yang mengajukan kredit ke lembaga keuangan, tidak semua UMKM menerima bantuan pinjaman, karena beberapa gagal memenuhi persyaratan, termasuk penyerahan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Badan Mikro Kecil (SAK EMKM) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Banyak sistem pencatatan keuangan yang masih menggunakan cara sederhana karena kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahap penyusunan keuangan berbasis SAK EMKM. Hal ini diungkapkan Rahandhika Ivan Adyaksana dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM”. Dan yang menjadi kendala UMKM dalam mengimplementasikan standar akuntansi yang berlaku yaitu karena kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi.⁹ Salah satu alasan mengapa aktor SMU tidak memprioritaskan entri akuntansi adalah keyakinan mereka bahwa omset penjualan lebih penting. Mereka menganggap laporan keuangan sebagai formalitas belaka untuk mengamankan

⁶Rejeki, “Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM).”

⁷ Purba, “Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam.”

⁸Diza Satrina Luchindawati, Elva Nuraina, and Elly Astuti, “Analisis Kesiapan Umkm Batik Di Kabupaten Madiun Dalam Penerapan Sak Emkm,” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2021): 241–49, <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2486.241-249>.

⁹ Purba, “Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam.”

dana dari sektor perbankan. Meski tidak mengikuti SAK EMKM, UMKM terus berkembang menurut UMKM.¹⁰

Kendala berikutnya yaitu pelaku UMKM belum melakukan pemisah antara uang pribadi dan usaha. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad dan Ade bahwa dalam usahanya, UMKM masih belum melakukan pemisah antara uang pribadi dengan uang usaha, dan minimnya sumberdaya manusia yang belum bisa memahami tentang standar akuntansi keuangan.¹¹ Devi Astriani dkk juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi UMKM yaitu permasalahan tentang akuntansi. Salah satu permasalahan akuntansi yang umumnya dihadapi ialah terlalu mengabaikan laporan keuangan karena minimnya pengetahuan.¹²

UMKM Kabupaten Pati berkembang pesat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk memperkuat perekonomian daerah, aspek positif ini perlu dipupuk. UMKM di Kabupaten Pati beranekaragam, diantaranya yaitu UMKM industry pangan, UMKM pembuatan batik dan sebagainya. Sama seperti UMKM pada umumnya, UMKM yang berada di Kabupaten Pati juga dihadapkan dengan segelintir masalah dalam penyusunan laporan keuangannya, diantaranya yaitu tidak adanya pemisah antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dalam pencatatannya UMKM masih melakukannya dengan cara tradisional. Hal ini dapat beresiko serta menimbulkan masalah dalam mencatat ataupun salah menyajikan. Hal lainnya yaitu karena tidak adanya SDM yang mampu mengaplikasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan Pemilik UMKM Keripik Tempe Ibu Restutik pada tanggal 14 September 2022, juga menyampaikan hal yang sama yaitu dulu sempat melakukan pembukuan namun karena malas dan tidak ada karyawan khusus yang faham akuntansi untuk melakukan pembukuan hingga pada akhirnya sekarang tidak melakukan

¹⁰ Eka Ayu Noer Kholifah and Imam Darul Firmansyah, "Accounting Is Monster: Kesiapan Umkm Keripik Muris Dalam Menerapkan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Emkm," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 67–79, <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i2.1266>.

¹¹ Ahmad Sholikin and Ade Setiawan, "Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora)," *Journal Of Islamic Finance and Accounting* 1, no. 1 (2018): 63–76.

¹² Astriani, Puspitasari, and Trias, "Kesiapan Umkm dalam Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi."

pembukuan kembali, sehingga dalam melihat keuntungannya dengan cara perkiraan.¹³

Luh Gede dkk mengungkapkan setiap UMKM diharapkan untuk menyusun laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan financial juga digunakan untuk memepertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya yang ada di usaha tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada pasal 48, dapat dikatakan bahwa pemegang izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan izinya, mentaati ketentuan-ketentuannya, menyusun pembukuan usahanya, dan menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu setelah izin diterbitkan. Namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui dan belum mempraktekkan hal tersebut.¹⁴ Sumber hukum Islam yakni Al-Quran, yang menyebutkan tata cara akuntansi dan syarat-syarat transaksi. Kitab Suci Al-Quran yang menjadi landasan pencatatan transaksi adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utangpiutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya." (QS.Al-Baqarah :282).¹⁵

¹³Ibu Restutik, 14 November 2022, 15.45 WIB.

¹⁴ Luh Gede Kusuma Dewi and Luh Gede Jayanti Mekar Sari, "Analisis Kesiapan Dan Pengetahuan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Studi Kasus Pada Usaha Menengah Di Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 2 (2019): 141–60.

¹⁵ Usmani, *Mushaf Aisyah* (Jakarta: Al-Fatih Insan Media Pustaka, 2012).

QS. Al-Baqarah (2): Ada petunjuk yang jelas dalam ayat 282 tentang pencatatan transaksi keuangan. Istilah "mencatat" muncul delapan kali dalam bagian ini, meskipun salah satu tujuan utama akuntansi adalah mendokumentasikan. Seorang akuntan dapat mencatat transaksi berdasarkan porsinya dengan menggunakan paragraf ini sebagai panduan. Prinsip akuntansi syariah adalah inti dari keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat berarti bersikap adil sedangkan melakukan sebaliknya berarti menindas.

Lembaga yang membidangi seluruh akuntan Indonesia, DSAK IAI, telah menerbitkan Standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 8 Desember 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa IAI menghargai setiap aktor. sistem keuangan. SAK EMKM versi sederhana dikembangkan agar menjadi standar akuntansi keuangan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.¹⁶

Terdapat beberapa kekhususan standar dari SAK EMKM, yang pertama yaitu asumsi dasar SAK EMKM yang terdiri dari akrual, kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis. Yang kedua SAK EMKM mencantumkan pengakuan atas aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, dan yang ketiga komponen laporan keuangan SAK EMKM yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). SAK EMKM mencatat aset dan liabilitas UMKM sebesar harga perolehan, hanya menggunakan dasar pengukuran biaya historis. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode merupakan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Laporan laba rugi periode tersebut serta catatan laporan keuangan, yang mencakup rincian dan tambahan tentang beberapa akun terkait. Nama organisasi yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang penyajian rupiah dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan merupakan beberapa rinciannya. yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan.¹⁷

¹⁶Ayunin et al., "Analisis Kesiapan Usaha Kecil Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro," 2021, 146–54.

¹⁷ Antony Yudi, "Apakah Standar EMKM (Entitas Mikro Kecil & Menengah) Itu?," Bintaroweb, 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sholikin dan Ade Setiawan menemukan bahwa ketidaksiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM di Kabupaten Bora disebabkan karena pelaku UMKM belum mengetahui apa itu SAK EMKM karena belum adanya sosialisasi dari dinas Koperasi dan UMKM, serta dalam pencatatan keuangannya masih menggunakan basis kas dan masih belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dikarenakan tidak adanya SDM yang paham tentang penyusunan laporan keuangan.¹⁸ Diza Satria Luchindawati dkk, dalam penelitian tersebut yang menemukan kendala penghambat dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM belum diterapkan, karena minimnya pengetahuan terkait laporan dan banyaknya masyarakat yang masih mencatat laporan keuangannya secara sederhana yakni mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini tidak lepas dari sumberdaya yang dimiliki sangat minim serta belum memiliki kompetensi sedikit jadi dalam pengelolaan keuangannya sedikit dikesampingkan.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Ayu Noer Kholifah dan Imam Darul Firmansyah dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pencatatan laporan keuangannya pelaku UMKM tidak mencatat laporan keuangannya sesuai SAK EMKM, melainkan hanya dengan pencatatan sederhana atau cash basis dan tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha yang menjadikan pengurangan modal usaha jadi tidak jelas.²⁰

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Ayu Noer Kholifan dan Imam Darul Firmansyah. Perbedaannya terletak pada objek dan metode yang digunakan untuk analisis data. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan metode interpretif. Berdasarkan beberapa penelitian, para peneliti mengidentifikasi tiga faktor yang menentukan kesiapan UMKM dalam melaksanakan SAK EMKM. Faktor-faktor ini berkaitan dengan sumber daya manusia, pemahaman dan pengetahuan pelaku

¹⁸ Sholikin and Setiawan, "Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kota Bora)."

¹⁹ Luchindawati, Nuraina, and Astuti, "Analisis Kesiapan Umkm Batik Di Kota Madiun Dalam Penerapan Sak Emkm."

²⁰ Kholifah and Firmansyah, "Accounting Is Monster: Kesiapan Umkm Keripik Muris Dalam Menerapkan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Emkm."

terhadap SAK EMKM serta persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan.

Penelitian ini menarik karena berbagai inisiatif pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Laporan keuangan, yang disusun sesuai dengan standar, merupakan komponen penting bagi setiap pemilik usaha, termasuk pemilik UMKM yang ada di Pati. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk menyelidiki sejauh mana UMKM mempersiapkan implementasi SAK EMKM. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi SAK ETAP terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang dipegang oleh pengusaha UMKM. Alasan utama penelitian ini dilakukan dengan harapan jika adanya SAK EMKM dengan versi sederhana dan mudah dapat membantu pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk memberi judul “Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Pati?

C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan UMKM dengan melihat pemahaman dan pengetahuan dari masing-masing UMKM tentang pencatatan laporan keuangan UMKM yang ada di Kabupaten Pati khususnya di Kecamatan Kayen, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus guna kepentingan usahanya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam kaitannya dengan pelaksanaan SAK EMKM pada pelaku UMKM, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan baru terkait kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Diharapkan penelitian ini akan memberikan bukti empiris dan menawarkan perspektif baru tentang kesiapan implementasi SAK EMKM di UMKM di Pati Kabupaten.
 - b. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber yang berharga bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam membangun dan mengevaluasi persiapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
 - c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain serta dapat menambah literatur yang berkaitan dengan implementasi kesiapan pelaku UMKM sesuai dengan SAK EMKM.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi sistematis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif dari setiap aspek penulisan penelitian, menekankan keterkaitan mereka untuk mendapatkan hasil penelitian sistematis yang mematuhi prinsip-prinsip ilmiah. Di sini kita memiliki komposisi penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisi lembar judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian skripsi, abstraksi, motto,

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian Isi

Berisi penjelasan temuan keseluruhan, yang dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, membentuk unit kohesif. Lima bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pendekatan sistematis untuk penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup tinjauan literatur komprehensif yang mencakup analisis teori yang digunakan dalam persiapan tesis, yakni: Teori Pengetahuan, Teori Kesiapan, juga disajikan penjabaran mengenai UMKM, SAK EMKM, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini sumber data, objek data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berfokus pada temuan penelitian, yang mencakup ikhtisar subjek penelitian dan analisis data, serta diskusi yang membandingkan hasil dengan teori dan penelitian lain.

BAB V : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data, menyoroti keterbatasan penelitian, dan memberikan saran untuk upaya penelitian di masa depan.